

2. Firman Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 29:⁴

يَأْتِيهَا الَّذِي آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al- Bazzar:⁵

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
 بَيْعٍ مَبْرُورٍ) (رواه احمد ابو داوود و النسائي و البيهقي)

“Nabi saw ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: (Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya dan setiap jual beli mabrur).” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki).

Berdasarkan nas-nas al-Quran dan hadis Nabi tersebut di atas, dapat penulis pahami bahwa Islam memperbolehkan muamalah dengan bentuk jual beli selama tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti terdapat unsur tipu menipu, saling merugikan, dan unsur riba. Imam Syafi'i menyatakan:⁶ “Bahwa pada asalnya seluruh bentuk jual beli diperbolehkan apabila dilakukan dengan persetujuan orang yang memperjualbelikan terhadap barang yang diperjualbelikan, kecuali terhadap apa yang dilarang oleh Rasulullah Saw, dan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah merupakan sesuatu yang diharamkan, dan selain hal tersebut kami memperbolehkannya berdasarkan perbolehan jual beli dalam kitab Allah.”

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 69.

⁵ Muhammad bin Isma'il al-Amir ash-Shanani, *Subūl as- Salām Syarah Bulughul Maram*, terjemahan Muhammad Isnan, Lc, dkk, jilid 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 3082.

⁶ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, 346.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh penjual dan pembeli tembakau dalam transaksi jual beli. Adapun rukun jual beli ada enam, yaitu:⁹ 1) *Sighat* (ijab dan kabul), 2) *Aqid* (penjual dan pembeli), 3) *Ma'qud 'Alaih* (harga dan barang yang dihargai).

Sighat dalam jual beli ialah setiap sesuatu yang menunjukkan atas adanya kerelaan dari dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, *sighat* mempunyai dua bentuk sebagai berikut:¹⁰

- (a) Ucapan dan sesuatu yang semakna seperti delegasi dan tulisan, ucapan ialah lafadz yang menunjukkan atas kepemilikan atau saling memiliki, seperti lafadz *bi'tuka* (saya menjual kepadamu) dan lafadz *ishtaraitu* (saya membeli), ucapan yang keluar dari penjual disebut ijab dan ucapan yang keluar dari pembeli disebut kabul.

⁹ *Ibid.*, 141.

¹⁰ *ibid*

- (1) Berakal dan *mumayyiz*, Ulama' Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. *Taşarruf* yang boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* dan berakal secara umum ada tiga: *Taşarruf* yang bermanfaat secara murni seperti hibah, *Taşarruf* yang tidak bermanfaat secara murni seperti tidak sah talak oleh anak kecil, dan *taşarruf* yang berada di antara kemanfaatan dan kemudharatan yaitu aktifitas yang boleh dilakukan tetapi atas seizin wali.
- (2) 'Aqid harus berbilang sehingga tidak sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.
- (b) Syarat dalam akad; syarat ini hanya satu yaitu harus sesuai antara ijab dan kabul.
- (c) Tempat akad; harus bersatu dan berhubungan antara ijab dan kabul.
- (d) *Ma'qud 'alaih* (objek akad); *ma'qud 'alaih* harus memenuhi empat syarat:
- (1) *Ma'qud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum nampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.

tangga. Meminjamkan atau mengutangkan uang (modal) seharusnya dihargai sebagai *tijārah* (usaha kerja) sehingga pemilik modal berhak memungut keuntungan.

Ketiga: *al-Khalāfiyah* (penggantian). *Al-Khalāfiyah* adalah "Penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama".²⁸ Dengan demikian *khalāfiyah* dibedakan menjadi dua. Pertama, adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan. Dalam pewarisan seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya (*tirkah*). Jika seseorang wafat sama sekali tidak mempunyai harta, atau harta yang ditinggalkannya tidak cukup untuk melunasi hutangnya.

Dalam hal ini menurut Musthafa al-Zarqa', seorang Fuqaha Hanafiyah, ahli warisnya tidak dapat dituntut melunasi hutang tersebut dengan harta-kekayaan sendiri. Sebab *al-irs* (pewarisan) ditetapkan oleh *shara'* sebagai sebab penggantian pemilikan, bukan sebagai sebab penggantian piutang.²⁹ Kedua, penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada *tadhmin* (pertanggunggaan) ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widh* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan

²⁸ *Ibid.*, 176.

²⁹ Musthafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, (Beirut: Dar-al Fikr, 1968), Jilid I, 250

berlangsung dalam satu musim tanam. Berbeda dengan kasus persewaan tanah untuk pertanian. Dalam hal ini penggunaan melebihi batas waktu sampai masa panen diganti dengan penambahan ongkos sewa. Dengan cara demikian terpeliharalah hak pemilik sedang pihak penyewa tidak dirugikan.

- (ii) Dalam kasus pinjaman untuk tujuan perkebunan dan untuk mendirikan bangunan, pemilik tanah berhak menarik kembali tanahnya setiap saat ia suka. Ketika itu peminjam wajib mencabut kebun atau merobohkan bangunan dan menyerahkan tanah kepada pemiliknya dalam keadaan kosong. Karena perkebunan pendirian bangunan berlangsung tidak terbatas masa tertentu, tidak seperti pertanian yang berakhir dengan masa panen. Namun jika sejak semula pinjaman tersebut di batasi dengan waktu, sedang pemilik menarik kembali tanahnya sebelum usaha yang dilakukan pihak peminjam selesai dilakukan, maka pemilik benar benar telah berbuat curang (*gharar*) yang sangat merugikan.

Dalam kasus seperti ini pihak peminjam berhak menuntut kerugian yang dihitung sejak pengosongan tanah sampai batas akhir waktu, dengan mempertimbangkan harga jual bangunan atau perkebunan.

Prinsip keempat, bahwa pada prinsipnya pemilikan benda tidak dapat digugurkan, namun dapat dialihkan atau dipindah. Sekalipun seseorang bermaksud menggugurkan hak miliknya atas suatu barang, tidak terjadi

harta campuran. Namun jika *ijārah* dilakukan oleh masing-masing sekutu atas keseluruhan harta campuran, yang demikian ini tidak ada halangan.

Prinsip keenam, bahwa pada prinsipnya milik campuran atas hutang bersama yang berupa suatu beban pertanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan. Apabila pemilikan atas hutang berserikat telah dilunasi (diserahkan) maka telah berubah menjadi *milk al-'ain* bukan lagi sebagai *milk al-dain*.

Kemudian dapat dilakukan pembagian bagi masing-masing pemilikinya, sebagaimana yang dapat dilakukan terhadap setiap harta campuran yang dapat menerima pembagian. Berdasarkan prinsip ini, apabila salah seorang dari sejumlah orang yang memiliki piutang bersama menerima pelunasan hutang yang sepadan dengan bagian yang dimilikinya, maka pelunasan tersebut harus dibagi di antara sekutunya. Sebab kalau seorang di antara mereka dapat melepaskan diri dari sekutunya dalam hal pelunasan hutang harus dinyatakan sebelumnya bahwa telah terjadi pembagian atas piutang bersama dalam bentuk pertanggungan sehingga tidak lagi sebagai piutang bersama, melainkan telah berubah menjadi piutang *mumayyazah*. Demikianlah maksud dari "piutang bersama tidak dapat dipisah-pisahkan".

C. Konsep Jaminan Menurut Hukum Islam

Secara umum, jaminan dalam hukum Islam (fikih) dibagi menjadi dua; jaminan yang berupa orang (*personal guaranty*) dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah *kafalah*, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*. Menurut bahasa Secara etimologis, *kafalah* berarti *al-ḍamanah*, *hamalah*, dan *za'amah*, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin atau menanggung.³⁵ Sedangkan menurut terminology *Kafalah* didefinisikan sebagai: “Jaminan yang diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban / prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)”.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Imran ayat 37 yaitu “Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya (Maryam)”. Di samping itu, *kafalah* berarti *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggungan). Disebut *ḍamman* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan harta, *hamalah* apabila dikaitkan dengan *diyāt* (denda dalam hukum *qīṣāṣ*), *za'amah* jika berkaitan dengan harta (barang modal), dan *kafalah* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan jiwa.

Menurut *shara'* Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih, *kafalah* dapat didefinisikan sebagai berikut:³⁶

- 1) Mazhab Hanafi, *kafalah* adalah, "menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang.”

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6, 2002), 41.

³⁶M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), 123.

Pada asalnya, *kafalah* adalah padanan dari *ḍamman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, situasi telah mengubah pengertian ini. *Kafalah* identik dengan *kafalah al-wajhi* (*personal guarantee*, jaminan diri), sedangkan *ḍamman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.³⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *kafalah* adalah jaminan dari penjamin (pihak ketiga), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua tersebut kepada pihak lain (pihak pertama). Konsep ini agak berbeda dengan konsep *rahn* yang juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang yang berhutang. Ulama madzhab fikih membolehkan kedua jenis *kafalah* tersebut, baik diri maupun barang.

³⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 106